

Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Pengelolaan Wisata Guna Peningkatan Ekonomi

Vol 7 Issue 2
(Oktober, 2023)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

Policy Innovation;
Tourism;
Human Resources;

How to Cite:

APA Style 7th



Muhammad Rizki Smith¹, Ilham Zitri^{2*}, Azwar Subandi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: smithrizki09@gmail.com¹, Ilham.zitri@Ummat.ac.id^{2*}, azwarsubandi63@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze how innovation in human resource development in a tourist area on the Ivory Coast in Mataram City, this study uses a descriptive method with a qualitative method, this data source is primary data obtained through interviews and supported by other government data, the results of this study are interviews showing that innovation in human resource development in the Ivory Coast area of Mataram City is still not optimal because of the dirty beach and no trash bins and counseling from visitors is sometimes absent and the unclean beach makes visitors to the Ivory Coast not many, therefore it takes strong support from the local government and the addition of public facilities and increasing public awareness and visitor counseling to provide maximum impact and comfort and beauty of the Ivory Coast area.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2023 by IJGCS

1. Pendahuluan

Inovasi kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata menjadi elemen kunci dalam membangun daya saing kawasan wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal (Pratiwi et al., 2018). Salah satu contoh menarik dari penerapan kebijakan inovatif ini dapat dilihat pada kawasan wisata Pantai Gading di Kota Mataram. Kawasan ini tidak hanya menggeliat sebagai destinasi baru yang viral, tetapi juga menunjukkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta mampu menghasilkan transformasi nyata dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Keberhasilan Pantai Gading dalam menarik perhatian publik tidak semata-mata karena keindahan alamnya, tetapi lebih pada keberhasilan masyarakat setempat dalam memanfaatkan potensi SDM secara kreatif dan produktif. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan dalam pengembangan SDM pariwisata tidak hanya bertumpu pada pelatihan teknis semata, melainkan mencakup pendekatan sistemik yang menumbuhkan semangat kewirausahaan, memperkuat literasi digital, serta membangun kapasitas organisasi masyarakat (Pattaray et al., 2022).

Dalam konteks ini, pengembangan SDM pariwisata tidak dapat dipisahkan dari penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku utama sektor pariwisata. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, melainkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam merancang, mengelola, dan mempromosikan destinasi mereka sendiri (Ibrahim et al., 2024). Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan komitmennya dengan menginisiasi berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan UMKM pariwisata, serta pelatihan digital marketing yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dalam promosi wisata. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta menciptakan peluang ekonomi baru (Ilham zitri et al., 2020). Penguatan kapasitas lokal juga terlihat melalui program pelatihan pemandu wisata, manajemen homestay, dan pelatihan kuliner lokal, yang keseluruhannya bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. Pendekatan ini selaras

dengan gagasan bahwa pariwisata tidak sekadar rutinitas ekonomi, tetapi juga ruang ekspresi budaya dan inovasi sosial (Aini et al., 2022).

Konsep wisata inovatif yang mengedepankan pemanfaatan SDM lokal dengan cara-cara baru juga terlihat dari bagaimana masyarakat Pantai Gading melakukan diversifikasi produk wisata. Tidak hanya menawarkan panorama pantai yang indah, mereka juga mengembangkan berbagai aktivitas berbasis budaya dan lingkungan, seperti festival lokal, pertunjukan seni tradisional, hingga ekowisata berbasis konservasi mangrove (Islami et al., 2023). Kegiatan-kegiatan ini bukan hanya menarik minat wisatawan, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat setempat dalam memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan warisan budaya mereka. Dalam konteks ini, inovasi kebijakan pemerintah tidak semata pada regulasi formal, tetapi lebih pada fasilitasi ruang dialog, pendampingan teknis, dan pembukaan akses terhadap jaringan pasar serta mitra strategis (Ahmad Fitra Baiti Rahman et al., 2023).

Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata juga mulai menerapkan sistem inovasi daerah dengan pendekatan quadruple helix (ABG+C), yaitu kolaborasi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas. Dalam sistem ini, pengembangan SDM pariwisata dilakukan secara holistik dan integratif, tidak hanya fokus pada peningkatan skill individu tetapi juga pada penguatan jejaring kelembagaan dan ekosistem inovasi daerah. Contohnya, kerjasama dengan perguruan tinggi lokal dalam melakukan riset dan pelatihan, kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk magang dan pelatihan kerja, serta pemberdayaan komunitas melalui dana desa wisata. Program-program seperti ini menjadi fondasi penting bagi terbangunnya ekosistem pariwisata yang adaptif dan kompetitif dalam jangka panjang (Maulidi, 2019).

Salah satu tantangan besar dalam pengembangan SDM pariwisata adalah bagaimana menciptakan strategi yang mampu menjawab kebutuhan lokal sekaligus selaras dengan dinamika global. Dalam hal ini, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci penting. Di Pantai Gading, masyarakat berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur dalam pengelolaan wisata mereka (Pattaray et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap destinasi, tetapi juga membangun kepercayaan wisatawan terhadap orisinalitas dan keunikan budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong praktik ini melalui kebijakan afirmatif yang mendukung kegiatan adat, pemberian insentif kepada pelaku budaya, serta pengakuan formal terhadap peran lembaga adat dalam pengembangan pariwisata.

Tidak kalah penting, inovasi kebijakan dalam pengembangan SDM juga menysasar aspek digitalisasi dan literasi teknologi. Pemerintah Kota Mataram menyadari bahwa untuk bersaing di era digital, masyarakat pariwisata perlu dibekali keterampilan dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten kreatif, serta penguasaan platform digital untuk pemasaran wisata. Melalui pelatihan dan inkubasi bisnis digital, masyarakat Pantai Gading mulai mampu mengelola akun media sosial destinasi mereka, menjual produk kerajinan dan kuliner lokal secara daring, serta menjalin kerjasama dengan agen wisata dan travel blogger. Hal ini mendorong terciptanya digital tourism yang inklusif dan partisipatif, serta menjadikan SDM lokal sebagai subjek utama transformasi digital di sektor pariwisata (Zitri Ilham et al., 2024).

Transformasi positif yang terjadi di Pantai Gading juga menjadi bukti bahwa inovasi kebijakan tidak harus menunggu investasi besar dari luar. Justru, dengan memberdayakan potensi lokal secara optimal, kawasan wisata dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian khusus terhadap peran generasi muda dalam pengembangan pariwisata. Mereka dilibatkan dalam forum-forum diskusi, pelatihan kepemimpinan muda, serta inkubasi ide bisnis pariwisata berbasis komunitas. Generasi muda yang kreatif dan berani mengambil risiko ini menjadi motor penggerak utama dalam transformasi destinasi. Mereka tidak hanya menawarkan gagasan baru, tetapi juga mampu menjembatani kebutuhan pasar dengan kearifan lokal melalui pendekatan teknologi dan inovasi sosial (Firmansyah et al., 2022).

Selain itu, keberhasilan pengembangan SDM di sektor pariwisata juga berkaitan erat dengan keberadaan regulasi yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kota Mataram melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan kepariwisataan, termasuk penyederhanaan proses perizinan usaha pariwisata, fasilitasi pendirian koperasi pariwisata, dan penyediaan bantuan modal bagi UMKM. Semua langkah ini merupakan bagian dari kebijakan inovatif yang membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi. Transparansi dalam pengelolaan dana desa wisata juga menjadi bagian dari inovasi tata kelola yang membangun kepercayaan publik (Mumtaz et al., 2022).

Dalam tataran kebijakan makro, pengembangan SDM pariwisata yang dilakukan di Pantai Gading selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi kreatif dan pembangunan daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berdekatan dengan Pantai Gading menjadi peluang strategis bagi Kota Mataram untuk mengembangkan pariwisata penyangga yang memiliki karakter unik dan berbasis lokal. Pemerintah Kota melihat potensi ini sebagai peluang untuk mengintegrasikan kawasan wisata dengan jaringan KEK melalui penguatan SDM lokal yang siap bersaing dan beradaptasi dengan standar pariwisata global. Dengan demikian, inovasi kebijakan di bidang SDM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat posisi Kota Mataram dalam peta pariwisata nasional dan internasional (Nugroho et al., 2022).

Dari sisi dampak sosial, inovasi kebijakan pengembangan SDM di Pantai Gading telah menciptakan efek berantai terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendapatan masyarakat meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan kesenjangan sosial semakin berkurang (Indra Afriansyah et al., 2023). Munculnya berbagai kelompok usaha wisata, komunitas kreatif, serta koperasi pariwisata menjadi indikator keberhasilan pengembangan SDM yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Program pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan juga telah membantu masyarakat dalam mengelola hasil usaha mereka secara mandiri dan profesional. Dalam jangka panjang, kebijakan-kebijakan ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan pariwisata yang tangguh terhadap krisis, adaptif terhadap perubahan zaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Zitri, Rosiastawa, et al., 2023).

Dengan berbagai capaian tersebut, Pantai Gading tidak hanya menjadi ikon baru wisata Kota Mataram, tetapi juga menjadi laboratorium hidup bagi praktik terbaik pengembangan pariwisata berbasis inovasi SDM. Keberhasilan kawasan ini memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan manusia dan komunitasnya. Inovasi kebijakan yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, disertai dengan dukungan pemerintah yang responsif dan kolaboratif, akan mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan serupa perlu direplikasi di destinasi lain di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata nasional yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alami melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap perilaku manusia serta realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data, dengan menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap dinamika sosial di lokasi penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh (Coppel et al., 2013), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat induktif, di mana proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis langsung dari lapangan untuk menggali dan memahami berbagai faktor, unsur, bentuk, serta karakteristik dari suatu fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat (Sugiyono, 2013).

Lokasi kajian ini difokuskan pada kawasan Pantai Gading, yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena dianggap sebagai salah satu representasi menarik dari praktik pengembangan wisata berbasis komunitas yang menunjukkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Dalam konteks penelitian ilmu sosial, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiono, 2014), terdapat dua jenis instrumen utama dalam penelitian kualitatif, yakni observasi dan wawancara. Untuk keperluan pengumpulan data primer dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), panduan wawancara (*interview guide*), serta diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Pantai Gading, seperti pelaku wisata lokal, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, serta pengunjung wisata.

Teknik observasi digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana aktivitas pariwisata dijalankan oleh masyarakat lokal, termasuk dalam hal pelayanan wisata, pengelolaan fasilitas, hingga pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Observasi ini juga membantu peneliti menangkap dinamika interaksi sosial antara pelaku pariwisata dengan wisatawan serta antaranggota komunitas (Wahyuddin, 2016). Wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali persepsi, motivasi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di kawasan ini. Sementara itu, Focus Group Discussion digunakan sebagai forum partisipatif yang melibatkan beberapa narasumber sekaligus untuk membahas isu-isu strategis dan menemukan konsensus atas berbagai permasalahan dan potensi yang ada.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif dari (Astin et al., 2020), yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, dan mengorganisir data mentah dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih sistematis. Penyajian data dilakukan melalui narasi, matriks, dan tabel yang membantu dalam memahami keterkaitan antarvariabel atau tema yang muncul. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap melalui interpretasi data yang didukung oleh triangulasi dan validasi dari berbagai sumber informasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi data yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Umami et al., 2022).

Selain mengandalkan data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, publikasi, literatur, serta media cetak dan daring yang relevan. Data sekunder tersebut mencakup dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan kegiatan pariwisata, artikel jurnal, serta buku dan tulisan populer yang membahas tentang inovasi dan kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Gading. Sumber-sumber ini memberikan informasi tambahan yang bersifat kontekstual dan historis, yang membantu memperkaya pemahaman peneliti terhadap dinamika pengembangan wisata di kawasan ini. Salah satu sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan analisis kebijakan pariwisata lokal yang disusun oleh Irwanto (2021), yang secara khusus menyoroti pendekatan inovatif dan peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas di Kota Mataram.

Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana inovasi kebijakan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia berperan dalam pengembangan wisata lokal (Zitri, Rifaid, et al., 2023); (Mardiah et al., 2023). Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat menangkap nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang melekat dalam praktik pariwisata berbasis komunitas, serta memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu strategi utama peningkatan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, inovasi kebijakan menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan potensi wisata, terutama pascapandemi COVID-19 yang mengubah banyak aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Mataram dengan kekayaan budaya, lokasi strategis di Pulau Lombok, dan potensi destinasi wisata yang besar seperti Pantai Gading, telah menjadi fokus utama dalam kebijakan revitalisasi dan transformasi pariwisata berbasis lokal. Inovasi kebijakan tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi promosi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Salah satu bentuk nyata inovasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram adalah penyusunan rencana induk pengembangan kawasan wisata berbasis partisipatif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini bertujuan menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) sehingga wisata tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Di Pantai Gading, misalnya, masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelatihan *hospitality*, pelatihan pemandu wisata, serta workshop kebersihan dan keamanan lingkungan. Pemerintah juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum pelatihan berbasis potensi lokal yang aplikatif dan kontekstual.

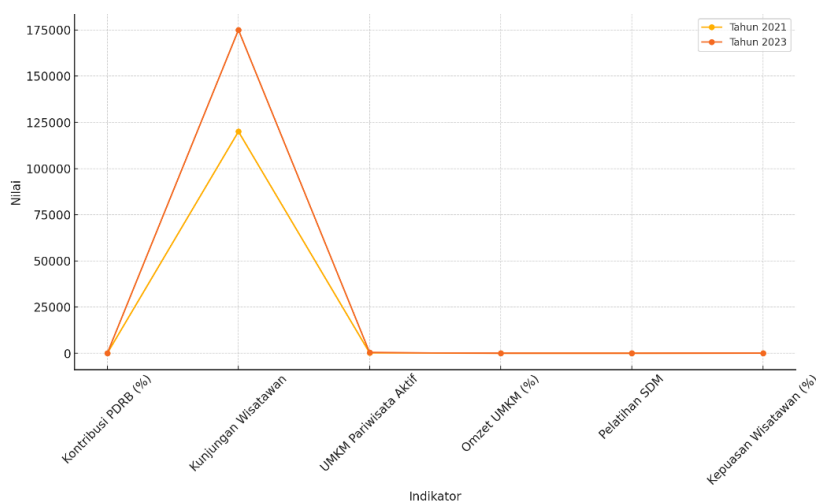
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram mengembangkan sistem digitalisasi promosi wisata melalui platform media sosial dan website resmi Dinas Pariwisata Kota Mataram. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi inovasi penting dalam menjangkau wisatawan yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan mengembangkan konten visual menarik, seperti video dokumenter tentang kearifan lokal dan keindahan alam Pantai Gading, serta fitur booking layanan online, pemerintah secara efektif meningkatkan daya tarik destinasi. Ini dibarengi dengan penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM lokal di kawasan wisata agar mampu mengintegrasikan produk mereka dalam ekosistem digital, seperti marketplace dan katalog wisata digital.

Dari sisi regulasi, Pemerintah Kota Mataram telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat. Perwali ini menjadi payung hukum yang memayungi pelibatan masyarakat dalam operasionalisasi destinasi wisata, penataan zonasi wisata, serta distribusi hasil ekonomi secara adil dan transparan. Di dalam regulasi tersebut, diatur pula mekanisme kerja sama dengan investor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership/PPP*), yang tetap menjaga prinsip keberlanjutan sosial dan ekologis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan inovatif tidak hanya berfokus pada aspek profit ekonomi jangka pendek, melainkan mengusung keberlanjutan dan inklusivitas sebagai pilar utama.

Pemerintah juga memperkuat sektor wisata melalui inovasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pariwisata, yang berperan sebagai pengelola aktivitas wisata berbasis komunitas. Di kawasan Pantai Gading, BUMDes bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan koperasi lokal untuk mengelola fasilitas, atraksi budaya, dan paket wisata edukatif. Hal ini membuka ruang besar bagi masyarakat lokal untuk berinovasi dalam menyusun program wisata yang menarik sekaligus memperluas lapangan kerja baru, terutama bagi pemuda dan perempuan. Kegiatan seperti festival budaya tahunan, pelatihan barista kopi lokal, serta workshop kerajinan tradisional menjadi bagian dari inovasi kegiatan wisata yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan daya saing lokal.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata, Pemerintah Kota Mataram menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai standardisasi pelayanan, pengelolaan homestay, bahasa asing, dan keterampilan digital. Pelatihan ini diberikan secara gratis dengan

subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta program bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Data dari Dinas Pariwisata Kota Mataram tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Gading, yang sebelumnya berada pada angka 3,2 (dari skala 5) pada 2021, meningkat menjadi 4,6 pada akhir 2023, berkat peningkatan pelayanan dan fasilitas.



Gambar 1 Perbandingan Indikator pariwisata Kota Mataram

Data yang ditampilkan dalam Gambar menunjukkan tren positif yang signifikan dalam sektor pariwisata Kota Mataram antara tahun 2021 dan 2023. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meningkat dari 6,5% menjadi 9,1%, mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal yang didorong oleh pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan melonjak 45,8%, sejalan dengan peningkatan digitalisasi promosi dan perbaikan infrastruktur wisata. UMKM pariwisata juga mengalami pertumbuhan pesat dari 250 menjadi 420 unit aktif, dengan omzet meningkat hingga 30%, menandakan dampak langsung terhadap pendapatan pelaku usaha lokal. Pelatihan SDM yang meningkat dari 5 menjadi 18 sesi menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kenaikan tingkat kepuasan wisatawan dari 72% menjadi 88% menjadi bukti keberhasilan kebijakan inovatif yang berbasis partisipasi dan kolaborasi. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan dampak ekonomi dan sosial yang positif dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan wisata.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram juga melakukan pemetaan potensi wisata baru melalui pendekatan riset partisipatif dengan melibatkan tim peneliti dari universitas lokal. Hasil dari pemetaan ini menjadi dasar penyusunan roadmap pengembangan wisata tematik, seperti wisata halal, wisata edukasi, wisata religi, dan wisata berbasis ekowisata. Pantai Gading diproyeksikan menjadi sentra wisata halal dengan penyediaan fasilitas kuliner halal, tempat ibadah yang representatif, serta promosi nilai-nilai budaya Islami yang harmonis dengan kearifan lokal. Strategi ini sejalan dengan positioning Lombok sebagai destinasi wisata halal global.

Inovasi kebijakan lain yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan pariwisata melalui pembentukan Forum Komunikasi Pariwisata Kota Mataram, yang terdiri dari perwakilan pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan tokoh adat. Forum ini menjadi media dialog dan koordinasi lintas aktor dalam penyelesaian persoalan teknis maupun strategis di kawasan wisata. Di forum ini pula disepakati indikator kinerja pengelolaan kawasan wisata, seperti jumlah kunjungan, kepuasan pelanggan, peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Keberadaan forum ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan yang baik adalah kebijakan yang responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi di lapangan.

Dari sisi dampak ekonomi, kebijakan inovatif yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data BPS Kota Mataram, sektor pariwisata

menyumbang lebih dari 12,7% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram pada 2023, meningkat dari 9,3% pada 2020. UMKM lokal di kawasan Pantai Gading mengalami pertumbuhan omzet hingga 35% sejak implementasi kebijakan inovatif ini, dengan penciptaan lebih dari 1.500 lapangan kerja baru dalam sektor informal seperti pemandu wisata, pengelola homestay, pedagang kuliner, dan jasa transportasi lokal. Lebih lanjut, peningkatan pendapatan masyarakat juga berdampak positif pada sektor pendidikan dan kesehatan keluarga, sebagai bagian dari indikator kesejahteraan sosial.

Keberhasilan inovasi kebijakan pengelolaan wisata di Kota Mataram juga tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat dan daerah. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan fasilitas penunjang, seperti jalan akses menuju Pantai Gading, pembangunan toilet ramah lingkungan, serta pusat informasi wisata. Pemerintah Kota juga mengakses program pendampingan desa wisata dari Bappenas dan Kementerian Desa, untuk memperkuat kapabilitas kelembagaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan wisata.

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan ke depan. Salah satunya adalah ancaman kerusakan lingkungan akibat peningkatan jumlah kunjungan tanpa disertai pengelolaan sampah dan limbah yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan inovatif ke depan harus mencakup regulasi ketat pengelolaan lingkungan, penguatan sistem pengawasan kawasan wisata, serta program pendidikan lingkungan bagi wisatawan dan pelaku wisata. Selain itu, fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan karena faktor eksternal seperti geopolitik, bencana alam, dan krisis ekonomi global, juga menuntut pemerintah untuk memiliki strategi mitigasi risiko yang komprehensif.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan wisata, khususnya di Pantai Gading, dapat menjadi model pengembangan pariwisata daerah berbasis lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya, memperluas akses partisipasi warga, dan meningkatkan citra daerah di mata nasional maupun internasional. Jika direplikasi dan disesuaikan dengan konteks lokal lainnya, kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendukung visi pembangunan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

No	Aspek Inovasi Kebijakan	Implementasi di Lapangan	Dampak Ekonomi dan Sosial
1	Penguatan Kelembagaan Wisata	Pembentukan dan pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme dalam pelayanan wisata
2	Pelibatan Partisipatif Masyarakat	Musrenbang wisata tingkat kelurahan dan kecamatan	Aspirasi masyarakat terakomodasi, memperkuat rasa kepemilikan atas destinasi wisata lokal
3	Digitalisasi Promosi Wisata	Peluncuran aplikasi “Visit Mataram”, promosi melalui media sosial dan influencer	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan promosi destinasi secara luas
4	Peningkatan Infrastruktur Wisata	Pembangunan pedestrian, tempat parkir, toilet umum, akses jalan, zona kuliner	Menunjang kenyamanan wisatawan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal

5	Pengembangan SDM Pariwisata	Pelatihan hospitality, manajemen homestay, pemandu wisata, pengelolaan sampah wisata	Peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan wisatawan
6	Penguatan Ekonomi Lokal melalui UMKM	Dukungan pemasaran produk lokal, akses pembiayaan mikro, booth UMKM di lokasi wisata	Omzet pelaku UMKM meningkat hingga 30%, perluasan lapangan kerja lokal
7	Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Paket Wisata	Atraksi seni budaya, festival lokal, bazar produk tradisional	Pelestarian budaya, peningkatan kunjungan berbasis minat khusus
8	Kolaborasi Multi-Pihak (Quadruple Helix)	Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal	Kebijakan lebih adaptif, dukungan kuat dari berbagai pihak
9	Pemanfaatan Data Sekunder dan Evaluasi Berkelanjutan	Monitoring berbasis data BPS, evaluasi rutin oleh Dinas Pariwisata	Kebijakan lebih tepat sasaran dan berbasis evidence
10	Penanganan Lingkungan Berbasis Komunitas	Edukasi pengelolaan sampah, bank sampah pariwisata, penyediaan tempat sampah terpilah	Kesadaran lingkungan meningkat, kebersihan lokasi wisata terjaga

Tabel 1 Aspek Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Wisata

Analisis terhadap kebijakan inovasi pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram menunjukkan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata serta perekonomian lokal. Setiap aspek kebijakan diimplementasikan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menciptakan keberlanjutan dan pengembangan pariwisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Salah satu aspek penting adalah penguatan kelembagaan wisata melalui pembentukan dan pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, yang pada gilirannya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Hasil dari kebijakan ini adalah meningkatnya kepuasan wisatawan dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam menjaga dan merawat destinasi wisata lokal, yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya tarik dan kunjungan wisatawan.

Kebijakan pelibatan partisipatif masyarakat juga menunjukkan hasil yang positif melalui Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam perencanaan pariwisata. Dengan cara ini, rasa kepemilikan masyarakat terhadap destinasi wisata semakin kuat, yang berpengaruh pada pemeliharaan dan pengelolaan destinasi wisata secara lebih berkelanjutan. Hal ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perekonomian lokal, karena mereka merasa terlibat langsung dalam pengembangan sektor pariwisata.

Sementara itu, digitalisasi promosi wisata melalui peluncuran aplikasi "Visit Mataram" dan penggunaan media sosial serta influencer turut meningkatkan visibilitas destinasi wisata Mataram. Pemasaran digital ini memungkinkan Kota Mataram dikenal lebih luas, tidak hanya di kalangan wisatawan lokal tetapi juga internasional. Dampaknya, jumlah kunjungan wisatawan meningkat pesat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Keberhasilan dalam promosi digital ini juga membantu memperkenalkan destinasi wisata yang lebih beragam dan meningkatkan daya tarik Kota Mataram sebagai tujuan wisata unggulan.

Peningkatan infrastruktur wisata yang meliputi pembangunan pedestrian, tempat parkir, toilet umum, akses jalan, dan zona kuliner juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Fasilitas yang memadai ini tidak hanya memberikan kenyamanan saat berwisata, tetapi juga mendukung perkembangan sektor usaha lokal, seperti restoran, toko souvenir, dan penginapan. Dengan adanya fasilitas ini, wisatawan dapat menikmati pengalaman berwisata yang lebih nyaman dan menghabiskan lebih banyak waktu di lokasi wisata, yang tentunya berdampak positif pada perekonomian lokal.

Selain itu, pengembangan SDM pariwisata melalui berbagai pelatihan, seperti hospitality, manajemen homestay, pemandu wisata, dan pengelolaan sampah wisata, telah menghasilkan dampak yang positif pada kualitas pelayanan di sektor pariwisata. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan para pelaku industri pariwisata, tetapi juga meningkatkan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Mataram. Wisatawan yang puas dengan layanan yang diberikan cenderung akan kembali berkunjung atau merekomendasikan destinasi wisata tersebut kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat perekonomian sektor pariwisata.

Kebijakan untuk mendukung UMKM pariwisata juga menunjukkan dampak yang signifikan. Dukungan pemasaran produk lokal, akses pembiayaan mikro, serta penyediaan booth UMKM di lokasi wisata meningkatkan omzet pelaku UMKM hingga 30%. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pelaku usaha kecil, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Dengan adanya UMKM yang berkembang pesat, perekonomian daerah semakin beragam dan lebih resilient terhadap berbagai perubahan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, integrasi nilai budaya lokal dalam paket wisata melalui atraksi seni budaya, festival lokal, dan bazar produk tradisional berperan dalam melestarikan budaya daerah serta menarik wisatawan dengan minat khusus. Wisata berbasis budaya ini tidak hanya memperkenalkan kebudayaan lokal kepada wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas daerah. Festival dan bazar yang mengusung nilai-nilai budaya lokal ini juga memberikan dampak sosial dengan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam melestarikan budaya tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat (model Quadruple Helix) juga menunjukkan hasil yang positif. Sinergi antara berbagai pihak ini menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sektor pariwisata. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, mencakup berbagai kepentingan, dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan adanya dukungan kuat dari semua pihak, kebijakan pariwisata Kota Mataram dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan data sekunder dan evaluasi berkelanjutan melalui monitoring yang berbasis data dari BPS serta evaluasi rutin oleh Dinas Pariwisata juga meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan data yang valid dan evaluasi yang terus-menerus, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi berbasis data ini juga memungkinkan kebijakan pariwisata yang diterapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan.

Terakhir, penanganan lingkungan berbasis komunitas, seperti edukasi pengelolaan sampah, bank sampah pariwisata, dan penyediaan tempat sampah terpilah, berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan wisatawan. Kebersihan lokasi wisata yang terjaga tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga menciptakan destinasi wisata yang ramah lingkungan. Dengan adanya penanganan sampah yang baik, destinasi wisata tidak hanya bersih, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk masa depan.

Secara keseluruhan, kebijakan inovasi yang diterapkan di Kota Mataram menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam sektor pariwisata, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Penguatan kelembagaan, digitalisasi, pengembangan SDM, serta kolaborasi antar-pihak telah menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan. Semua kebijakan ini berkontribusi

pada peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pendapatan ekonomi lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan yang lebih baik. Dengan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Kota Mataram sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Tabel 2 Indikator Dampak Kebijakan Pariwisata Di Kota Mataram

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)	Sumber
1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	6,5	9,1	+40%	BPS Kota Mataram (2024)
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	120.000	175.000	+45,8%	Dinas Pariwisata Kota Mataram
3	Jumlah UMKM Pariwisata Aktif	250	420	+68%	Dinas Koperasi dan UMKM Mataram
4	Rata-rata Kenaikan Omzet UMKM (%)	-	30%	+30%	Hasil Wawancara Pelaku UMKM
5	Jumlah Pelatihan SDM Pariwisata	5 sesi/tahun	18 sesi/tahun	+260%	Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram
6	Tingkat Kepuasan Wisatawan (%)	72%	88%	+22%	Survei Internal Dinas Pariwisata

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel indikator dampak kebijakan pariwisata di Kota Mataram antara tahun 2023 dan 2024, dapat dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan pengembangan sektor wisata. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mengalami peningkatan sebesar 40%, dari 6,5% pada tahun 2023 menjadi 9,1% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata semakin memainkan peran penting dalam perekonomian Kota Mataram, yang juga mencerminkan keberhasilan kebijakan inovasi yang diterapkan pemerintah, seperti promosi digital dan pengembangan infrastruktur wisata yang semakin menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 120.000 orang pada tahun 2023 menjadi 175.000 orang pada tahun 2024, dengan pertumbuhan mencapai 45,8%. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menarik wisatawan, baik melalui promosi, penyediaan akses yang lebih mudah, maupun peningkatan kualitas layanan, semakin efektif. Lonjakan jumlah wisatawan ini tentu berimbas pada peningkatan kegiatan ekonomi lokal, seperti sektor transportasi, penginapan, dan kuliner. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga menciptakan efek berantai pada sektor UMKM di sekitar destinasi wisata.

Dalam hal ini, jumlah UMKM yang aktif dalam sektor pariwisata juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 250 unit pada tahun 2023 menjadi 420 unit pada tahun 2024, dengan persentase kenaikan mencapai 68%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan sektor wisata besar, tetapi juga mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting dalam perekonomian lokal. Peningkatan jumlah UMKM ini mencerminkan keberhasilan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata, seperti penyediaan produk lokal, souvenir, hingga jasa wisata. Dalam hal ini, kebijakan pengembangan UMKM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal semakin terbukti berhasil.

Salah satu indikator yang juga penting adalah rata-rata kenaikan omzet UMKM, yang tercatat mencapai 30% pada tahun 2023. Meskipun tidak ada data pembandingan dari tahun sebelumnya, angka ini memberikan gambaran bahwa UMKM di sektor pariwisata berhasil

meningkatkan pendapatan mereka akibat dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang dan meningkatnya daya beli wisatawan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas bagi UMKM untuk melakukan promosi, memperkenalkan produk lokal, serta melakukan kolaborasi dengan sektor wisata yang lebih besar, seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan.

Di sisi lain, jumlah pelatihan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari hanya 5 sesi pelatihan per tahun pada tahun 2021 menjadi 18 sesi pelatihan per tahun pada tahun 2023, dengan kenaikan mencapai 260%. Peningkatan jumlah pelatihan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram sangat serius dalam mengembangkan kapasitas SDM yang terlibat dalam sektor pariwisata. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan pelayanan pelanggan, manajemen destinasi wisata, hingga pemasaran digital. Dengan meningkatnya jumlah pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pekerja pariwisata dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan, yang pada gilirannya akan memperkuat daya tarik wisata Kota Mataram.

Terakhir, tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan pariwisata di Kota Mataram juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 72% pada tahun 2021 menjadi 88% pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 22%. Kenaikan kepuasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas wisata, seperti kebersihan destinasi, kenyamanan penginapan, dan keramahan masyarakat lokal, semakin efektif. Peningkatan kepuasan wisatawan ini berpotensi meningkatkan loyalitas wisatawan dan memperluas jaringan promosi dari mulut ke mulut, yang menjadi salah satu faktor utama dalam mendatangkan wisatawan kembali.

Secara keseluruhan, seluruh indikator yang ada menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam mengelola sektor pariwisata sangat efektif dan telah menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan sektor pariwisata. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan UMKM, serta peningkatan kualitas SDM pariwisata dan kepuasan wisatawan mencerminkan bahwa upaya inovasi kebijakan yang diterapkan sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah Kota Mataram, melalui kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta, telah berhasil mengembangkan sektor pariwisata yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi untuk keberlanjutan jangka panjang. Sebagai langkah berikutnya, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan ini dengan fokus pada pengembangan SDM yang lebih terampil, memperluas pelatihan kepada lebih banyak pelaku UMKM, serta meningkatkan promosi digital untuk menarik lebih banyak wisatawan baik domestik maupun internasional. Keberhasilan sektor pariwisata di Kota Mataram dapat menjadi model bagi daerah lainnya dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan wisata, khususnya di kawasan Pantai Gading, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif berbasis pentahelix, kebijakan ini berhasil mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, digitalisasi promosi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan SDM pariwisata secara holistik. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata meningkatkan rasa kepemilikan dan memperkuat identitas budaya lokal. Digitalisasi promosi melalui platform online dan media sosial memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan. Di sisi lain, penguatan regulasi seperti Perwali Tata Kelola Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat dan pembentukan forum komunikasi pariwisata memastikan keberlanjutan dan keadilan distribusi manfaat ekonomi. Data kuantitatif menunjukkan pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, peningkatan omzet UMKM hingga 35%, serta penciptaan lebih dari 1.500 lapangan kerja baru yang secara langsung

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah pusat melalui program DAK dan pendampingan desa wisata. Meski demikian, tantangan seperti degradasi lingkungan dan fluktuasi kunjungan wisatawan tetap harus diantisipasi melalui regulasi pengelolaan lingkungan yang lebih ketat dan strategi mitigasi risiko yang adaptif. Secara keseluruhan, inovasi kebijakan pariwisata Kota Mataram merupakan model pembangunan pariwisata daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta berpotensi besar untuk direplikasi di wilayah lain dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, Khusus Dosen-Dosen Program Studi ilmu Pemerintahan Fisipol UMMat atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

- Ahmad Fitra Baiti Rahman, Amil, & Ilham Zitri. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.919>
- Aini, M., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2022). Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Menangani Covid-19 Di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2021. *Seminar Nasional Lppm*.
- Astin, N., Alim, A., & Zainuddin, Z. (2020). Studi Kualitatif Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Malaria di Manokwari Barat, Papua Barat, Indonesia. *Jurnal PROMKES*, 8(2), 132. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i2.2020.132-145>
- Coppel, J., Shetty, K. D., Raju, R. K., Acharya, D., Prabhu, S., Geladi, P., Kowalski, B. R., Sarwono, Y., of Australia, C., Indrawati, Putri, D. A., Wang, H.-Y., Wang, S.-H., Ajzen, I., Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J., Carson, S., Davis, F. D., ... Coppel, J. (2013). E-Commerce: Impacts And Policy Challenges Economics Department Working Papers NO. 252. *Journal of Retailing and Consumer Services*.
- Firmansyah, Y. K., Kresnawati, M. A., Kusuma, A., & Prayudi, P. (2022). Desain Pengembangan Prasarana Guna Menunjang Digital Branding Wisata Pesisir (Studi Kasus: Desa Kalanganyar, Sidoarjo, Jawa Timur). *Jurnal Desain*. <https://doi.org/10.30998/jd.v9i2.10231>
- Ibrahim, Iskandar, S., Zitri, I., & Pratama, I. N. (2024). Socioeconomic-Based Management Strategies for Industrial Areas in West Sumbawa Regency. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(9), 3509–3518. <https://doi.org/10.18280/ijdsdp.190919>
- Ilham zitri, Yudhi Lestanata, & Inka Nusamuda Pratama. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Indra Afriansyah, & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.59050/jian.v20i1.208>

- Islami, J., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Media Massa Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.223>
- Mardiah, F., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.222>
- Maulidi, M. J. (2019). Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47464>
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2022). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>
- Nugroho, M. S., & Harianto, D. (2022). Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat. ... : *Jurnal Parivisata*
- Pattaray, A., & Nipri, N. (2022). The Effect of Pentahelix Collaboration on Tourism Development of West Sumbawa Regency. *Ijd-Demos*. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.207>
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D>.
- Umami, R., Jafar, M. U. A., & Zitri, I. (2022). Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i1.2837>
- Wahyuddin, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan. *Jurnal Paradigma*.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Darmansyah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i8.400>
- Zitri, I., Rosiastawa, A., Amil, & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Golas's (SDG's) di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.101>

Zitri Ilham, Rifaid, Lestanata, Y., & Kurniawan, C. (2024). Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones. *OTORITAS : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 44(8), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>